BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama beberapa dekade terakhir, ekonomi Indonesia telah jatuh selama periode keuangan dan ekonomi krisis di Asia tahun 1997-1998. Setelah krisis, orang-orang mulai kehilangan persediaan dan persediaan mereka habis karena orang mengumpulkan dan menyimpan barang. Perusahaan bangkrut, pasar properti dan bank terguncang di ujung tanduk dan harga sembako meroket. Krisis di Indonesia disebabkan oleh kekurangan kepercayaan investor asing yang tiba-tiba mulai menarik uang mereka keluar dari Indonesia seperti yang mereka lakukan di tempat lain di Asia.

Sedangkan krisis ekonomi yang terjadi bukan hanya karena aspek makro ekonomi tetapi juga karena faktor tata kelola perusahaan yang buruk, seperti kurangnya standar yang sah dan akuntansi, audit keuangan belum diselesaikan, pasar modal yang kurang terstruktur, risiko yang dihadapi, dan ketidak pedulian terhadap hak saham minoritas. Hal ini membuktikan bahwa *Good Corporate Governance* memegang peranan penting dalam proses pengembangan perusahaan dan untuk kepentingan pemegang saham, karena mempengaruhi perekonomian negara berkembang.

Pada tahun 2013, Indonesia khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pihak lain direncanakan untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dengan membuat roadmap *Good Corporate Governance* (*Asian Development Bank Corporation,* 2017). Kerangka Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang kredibel dan efektif akan bermanfaat dalam meningkatkan domestik kepercayaan investor, penurunan biaya modal, kemudahan akses ke pasar ekuitas, dan akhirnya lebih mendorong sumber pembiayaan yang stabil. Tata kelola perusahaan terutama berfokus pada asosiasi antara manajer perusahaan, direktur, dan pemegang saham, untuk mengurangi potensi masalah keagenan dalam menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham.

Memaksimalkan nilai perusahaan merupakan salah satu tujuan perusahaan yang harus dicapai, salah satu cara untuk memaksimalkan perusahaan adalah dengan mempercayakan semua pengelelolaannya kepada

tenaga ahli atau profesional yang disebut manajer. Namun, dalam usaha untuk meningkatkan nilai perusahaan akan muncul konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham yang disebut konflik keagenan. Teori keagenan biasanya timbul diakibatkan perselisihan antara manajer dan pemegang saham, dengan kasus dari pihak manajer terlalu mementingkan profit pribadi dari pada kepentingan pemegang saham. Hal ini merupakan latar belakang perlunya tata kelola perusahaan yang baik.

Mekanisme *Good Corporate Governance* menjadi salah satu cara untuk mengurangi masalah pengendalian dan kepemilikan sebagaimana adanya terkait dengan peningkatan kinerja perusahaan yang berakibat pada peningkatan nilai perusahaan. Perusahaan yang mencetak skor tinggi dalam pengukuran tata kelola perusahaan cenderung mengungguli perusahaan lain dengan skor yang lebih rendah. Kenaikan nilai perusahaan biasanya ditandai dengan naiknya harga saham di pasar, karena harga pasar saham perusahaan mencerminkan penilaian investor secara keseluruhan untuk setiap ekuitas dimiliki oleh perusahaan.

Dewan komisaris berperan penting dalam tata kelola perusahaan yang baik. Menurut POJK.04 tahun 2017 Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan Efek yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* akan tetapi dewan komisaris tidak boleh ikut serta dalam mengambil segala keputusan dalam bidang operasional perusahaan. Dalam peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI pasal 12 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum menyatakan bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, dewan komisaris wajib membentuk setidaknya Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi.

Menurut POJK.04 tahun 2017 menyatakan Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Perusahaan Efek dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali. Apabila dalam perusahaan kinerjanya menurun, maka dewan komisaris akan mengatasi masalah yang dihadapi perusahaan.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan dan bertanggung jawab untuk membantu auditor independen. Komite audit berfungsi sebagai pengawas dalam menyusun laporan keuangan oleh pihak manajemen, selain itu komite audit juga berperan sebagai penghubung dari dewan komisaris, manajemen perusahaan dan pemegang saham. Berjalannya fungsi dewan komisaris dan komite audit secara efektif, maka kontrol terhadap perusahaan bukan untuk kepentingan pribadi, dengan demikian manajemen akan jujur mengelola perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Komite Remunerasi memiliki tugas untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS serta kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif. Kbijakan komite nominasi bertugas menyusun dan memberi rekomendasi kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai sistem perusahaan dan pemilihan atau penggantian anggota dewan komisaris dan direksi. Perusahaan yang memiliki komite remunerasi dan nominasi akan lebih memperhatikan kinerja perusahaan dengan baik.

Komite Pemantau Risiko secara umum bertugas untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses manajemen risiko yang berlangsung disebuah perusahaan. Komite pemantau risiko bertugas untuk melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi pemantau risiko yang disusun oleh direksi yang mencakup pengawasan aktif oleh direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan untuk penetapan limit, penetapn proses identifikasi dan sistem informasi pemantau risiko.

Nilai perusahaan adalah harapan para investor mengenai kondisi perusahaan yang baik, seperti peningkatan harga sahamnya dan kekayaan pemegang saham. Memaksimalkan nilai perusahaan juga akan berdampak kedepannya kepada para pemegang saham dan pihak lain percaya bahwa

perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dan prospek yang baik ke depannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan nilai rasio Tobin's Q dikarenakan rasio Tobin's Q ini lebih rasional dibandingkan oleh rasio-rasio yang lain karena unsur kewajiban dimasukkan sebagai dasar penghitungan. Para profesional yang dimaksud disini yaitu manajer ataupun komisaris. Dalam teori legitimasi organisasi bisa bertahan apabila organisasi berjalan berdasarkan dengan sistem nilai yang sama dengan sistem nilai masyarakat.

Menurut penelitian yang dilakukan Yushita (2017) mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap nilai perusahaan, memperoleh hasil bahwa ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan komite audit tidak. Kemudian, menurut Agus Bandiyono (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *The Effect of Good Corporate Governance and Political Connection on Value Firm* memperoleh hasil bahwa baik parsial maupun simultan variabel *Good Corporate Governance* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian lainnya yang memperoleh hasil bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan juga dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya; Karmila (2019), Dewi (2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Zainab (2019) mengenai *Influence of Corporate Governance on Firm Value Through Intellectual Capital and Corporate social responsibility* memperoleh hasil bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, hasil yang sama di dapati dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Azmy (2019) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Penelitian lainnya yang memperoleh hasil bahwa *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan juga dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya; Vera (2018), Melisa Maria (2018).

Corporate Social Responsibility (CSR) tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya saja. Namun tanggungjawab perusahaan harus didasari oleh triple bottom lines atau tiga garis bawah yang ada diperusahaan. Yang perlu digaris bawahi bukan hanya dalam kondisi

keuangan, namun juga harus memperhatikan kondisi-kondisi yang lain yaitu dimensi sosial dan lingkungan hidup karena perusahaan akan berhasil berkat memperhatikan dimensi-dimensi tersebut.

Dengan adanya penerapan mengenai *Corporate Social Responsibility*, citra perusahaan akan menjadi baik dalam masyarakat sebab akan mengandung nilai-nilai yang positif diantaranya dan juga akan meningkatkan loyalitas serta profit bagi perusahaan tersebut.

Selanjutnya, *Corporate Social Responsibility* dipilih sebagai variabel moderasi karena kegiatan *Corporate Social Responsibility* merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik yang diharapkan mampu memperkuat hubungan *Good Corporate Governance* dengan nilai perusahaan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut hanya terjadi pada perusahaan tertentu karena kondisi tiap perusahaan berbeda yang memungkinkan bahwa penerapan *Corporate Social Responsibility* maupun *Good Corporate Governance* justru tidak berpengaruh terhadap peningkatan nilai perusahaan.

Objek dari penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan mengambil beberapa Bank terbesar berdasarkan aset. Data 10 bank dengan aset terbesar hingga Maret 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.1. Daftar Bank Terbaik dan Total Asetnya

No	Nama Bank	Total Aset (Triliun Rp)
1	Bank BRI	1.416,76
2	Bank Mandiri	1.130,70
3	Bank BCA	953,70
4	Bank BNI	803,20
5	Bank BTN	308,10
6	Bank CIMB Niaga	271,80
7	Bank OCBC NISP	191,50
8	Bank Panin	185,10
9	Bank BTPN	184,90
10	Bank Danamon	178,30

Sumber: Data OJK Kuartal 1 2020

Pergerakan harga saham selalu mengarah kepada peningkatan yang cukup signifikan, hal ini akan memberikan gambaran jelas bagaimana faktor

fundamental dan faktor teknikal yang dibangun oleh pemerintah dan pihak perbankan mampu memberikan kepastian akan peluang berinvestasi kepada investor untuk berinvestasi di sub sektor perbankan yang lebih menarik di bandingkan sub sektor yang lain. Sehingga tingkat kepercayaan investor terhadap sub sektor keuangan mampu mendorong pergerakan roda pertumbuhan ekonomi di negara Indoensia.

Berdasarkan latar belakang yag telah dijelaskan, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana dewan komisaris, komisaris independen dan komite-komite dewan komisaris yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat judul penelitian "**Pengaruh Dewan Komisaris, Komisaris Independen dan Komite-Komite Dewan Komisaris Terhadap Nilai Perusahaan Pada Industri Pebankan Indonesia Dengan *Corporate social responsibility* Sebagai Variabel Moderasi"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti merumuskan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan?
4. Apakah komite remunerasi dan nominasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan?
5. Apakah komite pemantau risiko berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan?
6. Apakah *corporate social responsibility* memoderasi pengaruh dewan komisaris terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan?
7. Apakah *corporate social responsibility* memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan?

8. Apakah *corporate social responsibility* memoderasi pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan?
9. Apakah *corporate social responsibility* memoderasi pengaruh komite remunerasi dan nominasi terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan?
10. Apakah *corporate social responsibility* memoderasi pengaruh komite pemantau risiko terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan.
2. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan.
3. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan.
4. Untuk menganalisis pengaruh komite remunerasi dan nominasi terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan.
5. Untuk menganalisis pengaruh komite pemantau risiko terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan.
6. Untuk menganalisis *corporate social responsibility* memoderasi pengaruh dewan komisaris terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan
7. Untuk menganalisis *corporate social responsibility* memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan
8. Untuk menganalisis *corporate social responsibility* memoderasi pengaruh komite audit terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan
9. Untuk menganalisis *corporate social responsibility* memoderasi pengaruh komite remunerasi dan nominasi terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan
10. Untuk menganalisis *corporate social responsibility* memoderasi pengaruh komite pemantau risiko terhadap nilai perusahaan pada industri perbankan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini sebagai sarana untuk mengembangkan ide-ide dan pemikiran dalam menerapkan teori yang ada secara aktual, serta memperdalam pengetahuan tentang kondisi yang bagaimana suatu perbankan dapat menguntungkan sebagai media investasi maupun penyedia dana.

2. Bagi Akademisi

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan informasi atau referensi penelitian selanjutnya dan dalam hal pengembangan ilmu ekonomi khususnya manajemen keuangan, melalui pendekatan dan cakupan variabel yang digunakan, terutama tentang pengaruh dewan komisaris, komisaris independen dan komite-komite dewan komisaris terhadap nilai perusahaan perbankan.

3. Bagi Perusahaan Perbankan

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pembuatan keputusan untuk memaksimalkan nilai perusahaan perbankan.

4. Bagi Investor

   Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di perbankan.

5. Bagi Masyarakat (Nasabah, Investor, Kreditur dan Debitur)

   Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan dapat meningkatkan kepercayaan sebagai calon nasabah untuk menggunakan produk dan jasa perbankan.